

TRANSFORMASI MADRASAH SEBAGAI SEKOLAH UMUM BERCIRI KHAS ISLAM (Identifikasi Kendala Implementasi Kebijakan di Kabupaten Kudus)

Oleh : Supa'at

ABSTRACT

Historically the format of madrasah institution has changed from time to time, even radically. The birth, growth, and development of madrasah could not be separated with spreading Islam in archipelago. Due to that, it can be understood that madrasah is currently called the institution of Islamic education. According to Government Act No. 28 and 29/1990, madrasah is called as Islam Characterized-Public School. Legally the existence of madrasah is clearer with the birth of Act of National Education System in 2003.

This article is focused on mapping of challenges to implement the policy in Kudus. According to the writer, though 27 Madrasah Aliyah (public either private) in Kudus apply and refer to the national curriculum from Ministry of Religious Affairs (MoRA), but in its implementation they have academic vision and orientation differently. Generally at least there are three characteristics of MA in Kudus: firstly, Mas are absolutely the same with SMA (Public Senior High School), they are mainly Public Madrasah Aliyah; secondly, salaf-oriented MA, they try to integrate Islamic education with the ability to master yellow-books (kitab kuning), for instance MA Qudsiyah and MA TBS; and thirdly, MA implementing standard curriculum from MoRA, there are 23 MAs, all of them private, in this category.

Key words: Transformasi, Kebijakan, Pendidikan Islam

I. Pendahuluan

Substantif lembaga pendidikan madrasah merupakan kelanjutan atau modernisasi kegiatan pendidikan Islam yang telah ada sebelumnya yaitu pesantren (pondok pesantren). Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki sejarah yang cukup panjang, ia lahir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan masuk dan berkembangnya Islam di nusantara. Berbeda dengan pesantren yang

merupakan produk interaksi Islam dengan budaya lokal, madrasah baik nomenklatur maupun muatan konotasi dan historisnya tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Islam di Timur Tengah. Meskipun demikian fenomena madrasah di Indonesia memiliki interpretasi yang berbeda. Di Timur Tengah madrasah disebut sebagai lembaga pendidikan tradisional, sementara istilah madrasah yang ada di Indonesia diadopsi untuk memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan Islam, dengan menggunakan sistem klasikal, penjenjangan, penggunaan bangku, bahkan memasukkan pengetahuan umum sebagai bagian kurikulumnya (Maksum, 1999). Secara historis lahirnya madrasah di Indonesia merupakan respon kondisi pendidikan Islam di Indonesia yang semakin ketinggalan dengan pendidikan – sistem persekolahan - yang dikenalkan Belanda.

Meskipun telah terbukti memiliki kontribusi besar dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, namun pada kenyataannya lembaga pendidikan ini belum mendapat perhatian dan pengakuan yang semestinya dari pemerintah sampai lahirnya UUSPN tahun 1989. Hal tersebut berakibat pada rendahnya kualitas madrasah, sehingga madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas dua. Langkah besar untuk memperbaiki madrasah dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri pada tahun 1975. Materi inti dari SKB itu sendiri adalah tentang “peningkatan mutu pendidikan pada madrasah”, namun misi implisitnya di lapangan adalah pengakuan dan/atau kesetaraan. Sejak saat itu madrasah mengalami perubahan yang sangat substansial dan mendasar, karena sejak itu kurikulum madrasah menjadi 30% pelajaran agama dan 70% mata pelajaran umum. Sebelumnya komposisi kurikulum madrasah adalah 70% pelajaran agama dan 30% pelajaran umum. Inilah perubahan terbesar dan mendasar sebagai produk kebijakan yang pernah dialami oleh madrasah sejak kelahirannya.

Lahirnya UUSPN tahun 1989¹ yang diikuti dengan dikeluarkannya PP. No. 28 dan 29 th 1990, memberi predikat baru untuk madrasah yaitu Sekolah

¹ Sebagai produk politik proses lahirnya undang-undang ini memakan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena persoalan yang dibahas adalah terkait dengan persoalan sensitif bagi setiap orang, sehingga lahir apa yang disebut dengan “kelompok kepentingan”. Kelompok kepentingan dalam konteks UUSPN ini adalah kelompok nasionalis Islam dan kelompok nasionalis sekuler (Sirozi, 2004). Salah satu pasal atau hal yang diperdebatkan dan menjadi pusat perhatian masyarakat adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan agama. Yaitu pemberian pelajaran agama di sekolah-sekolah umum maupun pendidikan agama Islam dalam arti kelembagaan, yaitu madrasah. Namun sebagaimana kita ketahui dua hal yang menjadi aspirasi umat Islam akhirnya diakomodir dalam UUSPN 1989, yaitu dengan diberikan pelajaran agama dari SD sampai perguruan tinggi, dan untuk madrasah diakomodir dengan sebutan “sekolah keagamaan”. Secara historis inilah undang-undang yang pertama kali kita miliki sejak kemerdekaan yang mengatur masalah pendidikan secara komprehensif.

Umum Berciri Khas Agama Islam. Dengan format barunya ini kurikulum madrasah diperbaharui dengan kurikulum 1994 dengan perbandingan alokasi waktu antara 16-18% untuk pelajaran agama dan antara 82-86% mata pelajaran umum, dengan catatan bahwa alokasi waktu mata pelajaran umum muatan nasional diberlakukan 100% sama dengan sekolah umum setingkat.

Dengan format barunya tersebut memunculkan kekhawatiran, madrasah akan kehilangan jati dirinya dan menyimpang jauh dari misi awalnya, yaitu sebagai instrumen penyebaran agama. Kegelisahan ini cukup beralasan mengingat semakin rendahnya kompetensi para lulusan MA dalam penguasaan pengetahuan agama. Hal ini disebabkan karena sejak dikeluarkannya SKB tahun 1975 banyak pesantren yang kemudian menyelenggarakan pendidikan formal model madrasah atau sekolah yang menganut kurikulum pemerintah – Departemen Agama. Fakta inilah yang kemudian dikhawatirkan oleh sebagian kalangan bahwa pesantren dan madrasah akan kehilangan jati dirinya sebagai agen pencetak kader ulama (Suwito & Fauzan, 2004).

Dengan membandingkan awal keberadaannya dan keadaannya saat ini, Steenbrink (1994) menyebut perubahan madrasah sebagai perubahan besar dan mendasar. Tentang perubahan pendidikan, Ross and Bailey (1994) mengelompokkan berdasarkan karakteristik dan tujuan yang ingin dicapai menjadi; **reformasi**, **restrukturisasi** dan **transformasi**. Ketiga jenis perubahan tersebut dibedakan sebagai berikut:

“School reform refers to modest modifications in schools; school restructuring refers to substantial change in the educational process; and school transformation refers to a radical modification in the form and substance of education by reinterpreting teaching, learning, and knowledge. This definition of school transformation is appropriate when thinking about and using emerging technologies in school improvement” (Ross and Bailey, 1994:1).

Atas dasar pengertian tersebut dan realitas perubahan dalam formatnya saat ini, maka perubahan madrasah penulis kategorikan sebagai transformasi.

Persoalannya adalah; apakah berbagai perubahan madrasah tersebut telah mencapai apa yang diinginkan? Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut penulis tertarik untuk meneliti, terutama yang terkait dengan berbagai problem yang dihadapi. Adapun judul yang penulis pilih adalah: “**Transformasi Madrasah sebagai Sekolah Umum Berciri Khas Agama Islam: Identifikasi Kendala Implementasi Kebijakan di Kabupaten Kudus**”.

Secara umum masalah penelitian dalam penelitian ini dapat dirumuskan; “Bagaimana realitas dan implementasi transformasi Madrasah Aliyah sebagai

sekolah menengah umum berciri khas Islam dalam konteks sistem pendidikan nasional". Secara detail permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana format kelembagaan madrasah dengan status barunya tersebut?; (2) Bagaimana kurikulum dan model pembelajaran madrasah dengan format barunya tersebut?; (3) Bagaimana model pengelolaan madrasah dengan status dan format barunya tersebut?

Sesuai tema, fokus serta obyeknya maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ragam empiri implementasi transformasi madrasah sebagai produk kebijakan. Dari penelitian ini diharapkan akan terdeteksi dan teridentifikasi ragam implementasi madrasah dalam status barunya, baik hambatan/kekurangan atau peluang dan kelebihan. Bila dipilah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan model transformasi madrasah dalam hal-hal sebagai berikut: (1) tipologi kelembagaan madrasah; (2) sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengelolaan dan aktivitas substantif madrasah; (3) kurikulum dan pembelajaran madrasah; dan (4) ragam persepsi para pihak yang berkepentingan pada madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional.

II. Kajian Teori

1. Pendidikan Islam

Berbicara masalah madrasah maka tidak akan bisa dilepaskan dari pembahasan tentang pendidikan Islam. Secara etimologi, ada tiga akar kata dalam bahasa Arab yang sering dijadikan pijakan awal dalam mendefinisikan pendidikan Islam, yaitu *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*. Secara harfiah kata *tarbiyah* berarti pendidikan dan *ta'lim* berarti pengajaran, sehingga istilah pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya "*tarbiyah wa ta'lim*" (Zakiah Daradjat, *et.al.*, 2004). Secara lebih rinci al-Nahlawi (1989) menjelaskan bahwa *tarbiyah* dapat dipahami dari tiga akar kata; (1) kata *rabba-yarbu* yang berarti bertambah, bertumbuh, sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat *al-Rum* ayat 39; (2) kata *robbiya-yarba* yang berarti menjadi besar, dan (3) kata *rabba-yarubbu* yang berarti memperbaiki, menguasai urusan menuntun, menjaga dan memelihara. Dari segala kemungkinan derivasi tersebut, sebagai sebuah term dan konsep kata *al-tarbiyah* mempunyai beberapa unsur pokok; (1) memelihara *fitrah* anak dan memantapkannya dengan penuh perhatian; (2) menumbuhkan aneka ragam bakat dan kesiapannya; (3) mengarahkan *fitrah* dan bakat anak menuju yang lebih baik dan mengupayakan kesempurnaannya; dan (4) melakukan semua itu secara bertahap (Umar Yusuf Hayah, 1996: 2).

Sedangkan kata *ta'lim* berasal dari akar kata '*alima-yu'alimu-ta'lim* yang berarti –tahu atau mengetahui dan memberi tahu. Sebagai sebuah term *ta'lim* oleh beberapa ahli diartikan sebagai sebuah proses memberi pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah, sehingga terjadi pembersihan diri (*taẓkiyah*) dari segala kotoran dan menjadikan dirinya dalam kondisi siap untuk menerima *al-hikmah* serta mempelajari segala sesuatu yang belum diketahuinya dan berguna bagi dirinya (Jalal, 1977). Sebagai sinonim kata pengajaran, term *ta'lim* cakupannya lebih sempit dibanding istilah *tarbiyah*, yaitu hanya pada aspek kognitif saja. Oleh karenanya, menurut Naquib al-Atas (1992), aspek kognitif yang dijangkau dalam *ta'lim* tidak sampai pada memberikan porsi pengenalan secara mendasar. Baginya term paling tepat yang dapat menggambarkan pengertian pendidikan Islam dalam keseluruhan esensinya yang fundamental adalah *ta'dib*. Istilah ini sudah mengandung arti ilmu (pengetahuan), pengajaran (*ta'lim*) dan pengasuhan (*tarbiyah*). Oleh karenanya istilah *ta'dib* dapat mencakup beberapa aspek yang menjadi hakekat pendidikan yang saling terkait, seperti *'ilm* (ilmu), *'adl* (keadilan), *hikmah* (kebijakan), *'aml* (tindakan), *haq* (kebenaran), *nutq* (nalar), *nafs* (jiwa), *qalb* (hati), *aqal* (fikiran), *marotib* (derajat –tatanan hirarkhis), *ayah* (simbul), dan *adab*.

Terlepas dari segala kemungkinan derivatif dan konotasi tersebut, diantara tiga term tersebut secara kultural, dalam konteks pembahasan konsep pendidikan Islam, kata *tarbiyah* memiliki kelebihan, karena; (1) term *tarbiyah* lebih mengena karena konotasi ke-Tuhanan di dalamnya sangat kuat. Meskipun kegiatan pendidikan merupakan kegiatan manusia, namun dalam pandangan Islam semua kegiatan itu tidak lepas dari dan untuk Tuhan. (2) Secara eklektif pengertian-pengertian inti dan konotasi dari semua term tersebut dapat dipadukan sehingga menjadi kekuatan konsep pendidikan Islam. Atas dasar pertimbangan inilah, menurut Maksun (2004), pemilihan term *tarbiyah* lebih memiliki “nilai sosial” dalam arti istilah itu lebih umum dipakai dan/atau diterima oleh masyarakat Islam.

Dari pengertian kebahasaan tersebut para ahli selanjutnya mengembangkan batasan pendidikan Islam dari berbagai sudut pandang, terutama melihatnya dari hubungan dua konsep, yaitu “pendidikan” dan “Islam”. Menurut Tajab *et.al.* (1996) istilah pendidikan Islam dapat dipahami dari tiga sudut pandang yaitu: (1) pendidikan (menurut) Islam, (2) pendidikan (dalam) Islam, dan (3) pendidikan (agama) Islam.² Dalam kerangka kajian akademik, ketiga sudut

² Muhaimin *et.al* (2002) membagi konsep pendidikan Islam menjadi tiga; (1) pendidikan menurut Islam atau pendidikan Islami, (2) pendidikan ke-Islam-an atau pendidikan agama Islam, dan (3) pendidikan

pandang tersebut perlu dibedakan dengan tegas, karena masing-masing memiliki muatan konotasi dan secara teoritis akan melahirkan disiplin ilmu sendiri-sendiri. Pendidikan (menurut) Islam pengertiannya lebih bersifat normatif, sehingga secara akademik merupakan lahan kajian aspek filosofis. Dalam pengertian yang kedua pendidikan Islam lebih bersifat sosio-historis, sehingga menjadi bahan kajian sejarah. Adapun pemahaman yang ketiga, pendidikan Islam lebih bersifat proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam, dan ini merupakan kawasan ilmu pendidikan Islam teoritis.

Sebagai sebuah konsep, pendidikan Islam secara esensial selalu didefinisikan sebagai sebuah proses untuk membentuk manusia muslim berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Sebagaimana batasan yang diberikan oleh Musthofa dan Ally (1998), pendidikan Islam adalah sebuah proses bimbingan dari pendidik terhadap perkembangan jasmani, rohani, dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim. Dengan penekanan pada aspek "pewarisan", Zuharini *et.al.* (2004:12) merumuskan definisi pendidikan Islam adalah proses pewarisan dan pengembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedomankan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an dan terjabarkan dalam Sunnah Rosul. Menurut Ahmad Tafsir (2004), pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang terhadap seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Atau bila disingkat pengertian tersebut menjadi: bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin.

Dalam pandangan Islam manusia adalah entitas makhluk yang dikaruniai dengan berbagai **potensi yang sempurna**; jasmani dan rohani, jiwa dan akal, *nafs* dan *qalb*. Atas dasar keyakinan itulah maka konsep pendidikan Islam bersifat holistik-integral, dalam arti tidak dikhotomis. Semua potensi yang ada pada manusia diposisikan sebagai kesatuan organis yang bersifat dinamis yang saling berinteraksi. Oleh karenanya, berbagai potensi kesempurnaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia tersebut harus mampu dirubah atau diwujudkan menjadi **kesempurnaan aktual** melalui kegiatan pendidikan. Potensi kesempurnaan tersebut oleh Muhaimin, *et.al.* (2002) disebut dengan **instrumen potensial dan potensi dasar** (*fitrah*).³

dalam Islam atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan. Hasan Langgulung (1997), mengklasterkan term pendidikan Islam kedalam delapan pengertian, yang masing-masing memiliki konotasi tersendiri atau spesifik, yaitu: (1) *al-tarbiyah al-diniyah* (pendidikan keagamaan), (2) *ta'lim al-din* (pengajaran agama), (3) *al-ta'lim al-duny* (pengajaran keagamaan), (4) *al-ta'lim al-Islami* (pengajaran ke-Islaman), (5) *tarbiyah al-muslimin* (pendidikan orang-orang Islam), (6) *al-tarbiyah fi al-Islam* (pendidikan dalam Islam), (7) *al-tarbiyah 'inda al-muslimin* (pendidikan di kalangan umat Islam), dan (8) *al-tarbiyah al-Islamiyah* (pendidikan Islami).

³ Uraian lebih lanjut tentang **instrumen potensial dan potensi dasar** lihat Abdul Fattah Jalal (1977), Al-Maraghi (1966) Muhaimin & Zaini (1991). Secara harfiah kata *fitrah* dalam kamus *al-Munjid*

2. Format Kelembagaan

Sebagaimana produk budaya lainnya, konsep normatif pendidikan memerlukan institusi atau pranata sebagai alat untuk mencapai idealisme yang disepakati. Sebagai varian institusi sosial, lembaga pendidikan mawujud dalam organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar (Hendropuspito, 1988; 144). Salah satu varian kelembagaannya adalah sistem persekolahan (*schooling*). Menurut Kemmis dan McTaggart (1990; 36), "*Schooling is the institutionalised form of a society's ideas and hopes about education. Schools are intended to protect and nurture the pursuit of educational (and other social) values*".

Pelembagaan ide dan konsep pendidikan Islam sebagaimana tercakup dalam rumusan pengertian dan tujuan pendidikan Islam di atas, oleh karenanya menjadi sangat luas dan beragam yang mencakup tiga **satuan pendidikan**; pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal⁴. Format kelembagaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Sebagaimana dikatakan oleh Hasbullah (2001;127), *lembaga pendidikan Islam adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Dan proses tersebut dimulai dari keluarga. Tanpa bermaksud mengesampingkan arti penting jalur pendidikan informal/ keluarga dalam pembentukan moral dan kepribadian peserta didik, karena pertimbangan kesesuaian tema dan obyek penelitian ini, maka jalur pendidikan yang satu ini tidak dibahas.*

Karena tuntutan dan perubahan zaman, sistem dan kelembagaan pendidikan Islam sejak awal keberadaannya (era klasik) sampai saat ini telah mengalami berbagai perubahan. Untuk konteks Indonesia perubahan tersebut sangat menyesuaikan dengan kondisi dan budaya lokal, tujuan serta visi spesifik para pengembang dan pelaksana pendidikan Islam pada seting tertentu. Hasil interaksi dan akulturasi **misi Islam** dengan koteks, budaya serta kebutuhan lokal tersebut melahirkan format kelembagaan pendidikan Islam sebagai berikut: eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam merupakan proses interaksi **misi**

(1986:588) berarti; "ciptaan, sifat tertentu yang mana setiap yang maujud disifati dengannya pada masa awal penciptaanya, sifat pembawaan manusia (yang ada sejak lahir), agama, as-sunnah".

⁴ Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (UUSPN Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat 10, 11, 12, 13)

Islam dengan tiga kondisi. (1) Interaksi Islam dengan budaya lokal atau asli – pra-Islam – melalui proses akulturasi melahirkan **pesantren**. (2) Interaksi misi pendidikan Islam dengan tradisi Timur Tengah modern yang kemudian melahirkan lembaga pendidikan **madrasah**. (3) interaksi Islam dengan politik pendidikan Hindia Belanda yang kemudian melahirkan **sekolah Islam** (Suwito dan Fauzan, *Ed.*, 2004).

a. Pesantren

Terlepas dari segala kemungkinan derivatif istilah “pesantren”, satu hal yang pasti lembaga pendidikan ini telah lama ada dan asli (*indogeneous*) Indonesia dan merupakan cikal bakal lahirnya sistem pendidikan madrasah. Sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari *grass root people*, pesantren memiliki karakteristik, tujuan serta sistem tersendiri berbeda dengan sistem persekolahan, bahkan dalam hal-hal tertentu antara pesantren satu dengan lainnya juga terjadi perbedaan. Perbedaan, atau lebih tepatnya keragaman tersebut lebih bersifat artifisial karena secara substansial lembaga pendidikan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.

Tidak ada rumusan verbal yang baku dan seragam tentang tujuan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam, hal ini lebih disebabkan karena pesantren memiliki otonomi yang sangat tinggi. Namun bila dicermati substansi tujuan pesantren sesungguhnya adalah sama. Rumusan berikut adalah tujuan pesantren hasil rangkuman Mastuhu (1994) berdasarkan hasil penelitian di beberapa pesantren di Jawa timur:

“Menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat atau berkhidmat kepada masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat tetapi rasul, yaitu menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian nabi Muhammad (mengikuti sunah Nabi), mampu berdiri sendiri, bebas dan teguh dalam kepribadian, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam di tengah-tengah masyarakat (*izzul Islam wal Muslim*), dan mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia. Idialnya pengembangan kepribadian yang ingin dituju ialah kepribadian **Muhsin**, bukan sekedar muslim” (Mastuhu, 1994: 55)

Tanpa membedakan unsur-unsur dalam sistem pendidikan pesantren menjadi unsur organik dan anorganik⁵, sebagaimana dilakukan oleh Mastuhu (1994), secara umum ada lima elemen dasar dalam tradisi sistem pendidikan pesantren (Zamakhshari Dhofier, 1985), (DEPAG, 2004). Kelima elemen dasar inilah yang kemudian membedakan sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan yang lain. Elemen tersebut meliputi; (1) pondok, (2) Masjid, (3) pengajaran kitab-kitab klasik, (4) santri, (5) kiai.

b. Sekolah Islam

Sistem pendidikan ini sesungguhnya tidak jauh berbeda atau bahkan sama dengan sistem persekolahan yang dikenal dewasa ini di Indonesia, mulai dari SD, SMP dan SMU. Sebagai salah satu bentuk dan model pendidikan Islam, kelahiran lembaga pendidikan ini tujuannya adalah untuk merespon dan sekaligus mengimbangi perkembangan sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Pada sisi lain, kelahiran lembaga pendidikan ini adalah sebagai upaya nyata pembaharuan, modernisasi, formalisasi dan sistematisasi sistem pendidikan Islam yang ada. Label "sekolah Islam" ini lebih dilihat dari sudut pemrakarsa dan penyelenggara kegiatan pendidikan tersebut, yaitu organisasi-organisasi sosial keagamaan Islam. Lahirnya sekolah-sekolah Islam ini seiring dengan tumbuhnya organisasi sosial keagamaan yang diprakarsai oleh para tokoh muslim yang merasa prihatin dengan nasib pribumi. Meskipun pada awalnya organisasi tersebut tidak secara spesifik bergerak dalam bidang pendidikan, namun karena tuntutan kebutuhan pada akhirnya bidang pendidikan menjadi fokus utamanya.

Lahirnya sekolah Islam ini terutama didorong oleh kekhawatiran para tokoh muslim akan sekularisasi dalam sistem pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Secara ideologis ini merupakan ancaman serius bagi sebagian besar umat Islam, karena pada kenyataannya banyak anak-anak dari keluarga muslim pribumi yang mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah model Barat tersebut. Kekhawatiran itulah yang kemudian mendorong para tokoh muslim, terutama yang berpendidikan Barat, untuk mengadopsi sistem pendidikan Barat dengan mengisi atau memberi nuansa ke-Islaman dalam pengajarannya. Beberapa organisasi Islam yang memprakarsai sekolah-sekolah

⁵ Unsur organik meliputi; pimpinan, guru, murid, dan pengurus. Sedangkan unsur anorganik meliputi; tujuan, filsafat dan tata nilai, kurikulum dan sumber belajar, proses belajar dan mengajar, penerimaan murid dan tenaga kependidikan, teknologi kependidikan, dana, sarana, evaluasi, dan peraturan terkait lainnya didalam mengelola sistem pendidikan.

Islam antara lain: (1) *Jamiat Khair* atau *Al-Jami'ah al-Khoiriyah*, didirikan di Jakarta pada tahun 1905. (2) *Al-Irsyad* atau *Jami'ah al-Isblah wal Irsyad al-Arobiyyah* lahir tahun 1913. (3) Persyarikatan Ulama atau *huyyatul Qulub* lahir dan berkembang di daerah Majalengka Jawa Barat tahun 1911. (4) Muhammadiyah lahir dan berkembang di Yogyakarta pada tahun 1912. (5) Persatuan Islam (PERSIS) lahir dan berkembang di Bandung pada tahun 1923. (6) Nahdlatul Ulama lahir di Jombang Jawa Timur pada tahun 1926. (7) Dan masih banyak yang lain, terutama yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan budaya dan karakteristik daerah tertentu.

c. Madrasah

Secara harfiah kata *madrasah* berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sekolah. Istilah *madrasah* berasal dari akar kata "*darasa*" yang berarti tempat duduk untuk belajar, namun istilah *madrasah* sekarang ini telah menyatu dengan istilah sekolah atau perguruan (Perguruan Islam) (Poerwodarminto 1990;618). Menurut Makdisi (1991), istilah *madrasah* diambil dari akar kata *dars*, kata *dars* menunjuk pada mata pelajaran fikih; dan *tadris*, bentuk *verbal noun (masdar)*, berarti "mengajar fikih". Ulama fikih atau guru besar fikih disebut *mudarris* dan kata *darasa* tanpa dilengkapi sebuah komplement diartikan mengajarkan bidang studi fikih. Berbeda dengan bidang studi hadits, yang diambil dari bentuk kedua dari kata *haddatsa*, artinya mengajarkan pelajaran hadits *verbal noun haddatsa* adalah *tabdits*. Dalam pelajaran fikih tidak menggunakan istilah *fuuqaha-tafqih* (dari kata *fiqih*), tetapi *darrasa-tadris*. Diantara metode mengajar hadits adalah riwayat (meriwayatkan) atau *imla'* (mendikte), sedang metode mengajar dalam bidang fikih adalah *tadris*. Kata *madrasah* menunjukkan tempat (*isim makan*) dimana bidang studi fikih diajarkan

Di Indonesia bentuk pendidikan *madrasah* ini terdiri tiga tingkatan yang semuanya memakai peristilahan dari bahasa Arab, yaitu *Madrasah Ibtidaiyah* (MI) – secara harfiah berarti sekolah permulaan, *Madrasah Tsanawiyah* (MTs) – secara harfiah berarti sekolah menengah, dan *Madrasah Aliyah* (MA) - secara harfiah berarti sekolah atas. Secara berurutan tiga tingkatan *madrasah* tersebut ekuivalen/sejajar dengan SD, SMP dan SMA. Secara Umum lembaga pendidikan *Madrasah* ini dapat dibedakan menjadi dua. (1) *Madrasah* yang secara kelembagaan maupun substansi/proses pembelajarannya menggunakan pedoman dan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini DEPAG, baik negeri maupun swasta. (2) *Madrasah* eksistensinya secara kelembagaan maupun sistem pembelajarannya tidak terikat dengan pemerintah, sehingga status kelembagaannya semuanya adalah swasta. Dalam penyebutan sehari-hari, sekedar

untuk membedakan dengan madrasah model pertama, lembaga ini menggunakan kata *diniyah* (keagamaan), sehingga peristilahan yang digunakan adalah MI *diniyah*, MTs *diniyah*, dan MA *diniyah*.

3. Transformasi Madrasah dalam Perspektif Kebijakan

Menurut Muhammad Sirozi (2004), kebijakan sesungguhnya merupakan kompromi politik yang dinamis dan interaktif, suatu penyelesaian diantara kepentingan yang saling bersaing. Pendapat senada dikemukakan oleh Taylor *et.al.* (1977), kebijakan merupakan kompromi politik antara berbagai pandangan yang bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan. Kompromi yang dimaksud dicapai melalui *negosiasi nilai-nilai* antara pemerintah dengan berbagai kelompok sasaran kebijakan. Tentang hal ini Easton (1953) menekankan bahwa suatu kebijakan sesungguhnya adalah merupakan jaring keputusan dan tindakan yang menentukan nilai. Karena hakekat dasar kebijakan, tandas Easton, terletak pada kenyataan bahwa melaluinya ada hal tertentu yang tidak bisa dimiliki beberapa orang tetapi bisa dicapai orang lain. Sama dengan Easton, Prunty (1985) melihat kebijakan sebagai penentuan nilai secara berkekuasaan. Oleh karenanya, konsep kebijakan melibatkan penggunaan kekuasaan, kendali dan validasi nilai dari kelompok tertentu. Pentingnya nilai dan keterlibatan kekuasaan dalam proses kebijakan, juga ditekankan oleh Davis, Warhurst, dan Weller (1993), yang mendefinisikan kebijakan sebagai interaksi antara *nilai, kepentingan dan sumber, dibimbing melalui pranata dan diperantarai oleh politik.*

Kebanyakan para penulis tentang kebijakan sejalan dalam hal bahwa suatu kebijakan tidak selalu bersifat murni dan rasional. Tetapi selalu terkait dengan konteks, nilai, kepentingan dan sumber tertentu. Bahkan menurut Sniderman dan Tetlock (1986) faktor nilai dan suatu proses kebijakan bukan semata tampilan wajah tetapi mendasar. Karena sarat akan nilai-nilai dan mendasar maka, menurut Richardson (1993), proses lahirnya suatu kebijakan bahkan produk kebijakan itu sendiri tidak netral. Maka tidaklah mengherankan kalau suatu kebijakan selalu menguntungkan atau merugikan kelompok masyarakat yang berbeda. Karena sifatnya yang demikian inilah, Considine (1996), melihat kebijakan sebagai penjelasan atas nilai dan niat umum.

Untuk sekedar menyebut contoh, lamanya proses penyusunan UUSPN 1989 lebih disebabkan karena sulitnya dicapai kesepakatan tentang pasal-pasal yang krusial. Hal ini terjadi karena semua pihak merasa berkepentingan atas undang-undang itu. Sebagaimana dikatakan oleh Dye (1981), bahwa kebijakan pendidikan akan mempengaruhi ragam kepentingan yang luas, dan merangsang

banyak sekali kegiatan kelompok kepentingan. Karena, dalam istilah McKinnon (1960), pendidikan adalah urusan semua orang.

Sesuai tujuan serta muatan yang akan dicapai dari suatu kebijakan, Anderson (1979) membagi kebijakan menjadi dua belas maca, yaitu: (1) *Substantif policies*, (2) *Procedural policies*, (3) *distributive policies*, (4) *redistributive policies*, (5) *regulatory policies*, (6) *self regulatory policies*, (7) *material policies*, (8) *symbolic policies*, (9) *collective good policies*, (10) *private good policies*, (11) *liberal policies*, (12) *conservative policies*.

Terimplementasi atau tidaknya suatu kebijaksanaan atau berhasil tidaknya implementasi kebijaksanaan ditentukan oleh banyak faktor. Menurut Ali Imron (1996), ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan; (1) kompleksitas berbagai kebijakan yang telah dibuat, (2) ketidakjelasan rumusan masalah kebijakan dan alternatif pemecahan masalah kebijakan, (3) ketersediaan sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijaksanaan, (4) kemampuan dan keahlian pelaksana kebijakan, (5) dukungan dari khalayak sasaran kebijakan, dan (6) efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Sebagai produk kebijakan transformasi madrasah bertujuan untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik atau kualitas. Kebijakan pendidikan, atau dalam istilah Horse dan Mathison (1983) *social intervension in education*, tidak serta merta akan menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik. Karena kebijakan pendidikan dan pendidikan itu sendiri tidaklah berdiri sendiri tetapi banyak faktor yang terlibat, mempengaruhi dan bahkan menentukan. Bahkan tidak jarang suatu kebijakan yang disusun untuk menghasilkan perubahan, tidak menghasilkan apa-apa karena tidak didukung oleh berbagai faktor, terutama yang ada dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Fulan (1991); "*the purpose of educational change presumably is to help school accomplish their goals more effectively by replacing some stuctures, program and/or practice with the better ones*". Pendapat senada dikemukakan oleh Hopkins, et al. (1994) dalam Stoll dan Mortimore (1997:13), bahwa perubahan dan perbaikan⁶ dalam pendidikan memiliki makna; "*a distinct approach to educational change that enhances student outcomes as well as strengthening the school's capacity for managing change*".

Karena masalah pendidikan adalah menyangkut kepentingan dan kebutuhan banyak orang, maka perubahan dalam pendidikan adalah masalah fundamental yang selalu dan pasti terkait dengan kultur, persepsi bahkan keyakinan

⁶ Tentang hal ini Harrington (1987:11) menyebutnya dengan istilah *improvement process*, yang diartikan sebagai "... a group of activities that complement each other and provide an environment conducive to improving performance for employees and management alike".

masyarakat. Oleh karena itu para ahli pendidikan sepakat bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari suatu negara atau masyarakat. Sebaiknya, ia harus tumbuh dan “dijahit” sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut. Berdasarkan pandangan ini maka tidak ada konsep dan teori pendidikan yang berlaku atau bisa diterapkan secara menyeluruh, dalam arti bisa berlaku untuk tempat dan seting yang berbeda (Azumardi Azra dalam Abudin Nata, 2004).

Kesulitan atau kendala tersebut lebih disebabkan karena tempat atau setting, dalam konteks kelembagaan pendidikan, sekolah/madrasah sebagai suatu organisasi memiliki tradisi dan budaya yang dibangun dan menjadi acuan dalam berorganisasi, yaitu budaya organisasi (*organisational culture*). Oleh karenanya, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari perubahan struktur suatu organisasi, tetapi lebih dari itu menjangkau pada perubahan budaya organisasi. Menurut Brown (1989:9); “*Organisational culture refers to the pattern of beliefs, values and learned ways of coping with experience that have developed during the course of an organisation’s history, and which tend to be manifested in its material arrangement and in the behavior of its members*”. Dari definisi ini selanjutnya Brown menjabarkan isi budaya suatu organisasi (*contents of an organisation’s culture*) terdiri dari; (1) *artefacts*; (2) *language*; (3) *behaviour pattern*; (4) *norm of behaviour*; (5) *heroes*; (6) *symbols and symbolic action*; (7) *belief, values, and attitudes*; (8) *ethical codes*; (9) *basic assumptions*; dan (10) *history*.

III. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menjelaskan fenomena madrasah secara holistik setelah mengalami berbagai perubahan, maka pilihan metodologis yang paling tepat untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif paradigma naturalistik. Secara filosofis, sesuai dengan karakter data serta obyek kajiannya penelitian ini mengacu pada Post-positivisme-Phenomenologi (Muhadjir, 2001). Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan atas sifat kajian ini; perspektif teoritik, sasaran maupun datanya diyakini lebih relevan dengan pendekatan kualitatif. Pertimbangan lain, jawaban atas pertanyaan penelitian ini memerlukan keterangan kualitatif karena terkait dengan pandangan dan perilaku responden yang tidak bisa dijelaskan dengan metode kuantitatif. Sebagaimana dikatakan oleh Wilson (1995) penelitian kualitatif

adalah penelitian yang datanya berupa data kualitatif yaitu *descriptive material*; catatan, data verbal seperti apa yang dikatakan orang dalam wawancara, data visual seperti gambar atau foto. Kata-kata dimaksud meliputi yang tertulis atau terucapkan oleh orang-orang dan perilaku yang diamati, yang mengarah pada latar dan setting individu tersebut secara holistik (Lincoln & Guba, 1985). Oleh karenanya, validitas dan reliabilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini secara fundamental akan sangat bergantung kepada pengamatan berbagai tampilan para pihak dalam pengelolaan dan/atau kegiatan madrasah secara umum (Kirk & Miller, 1986).

2. Lokasi dan Setting Penelitian

Secara geografis penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Kudus, dengan setting pengelolaan MA. Mengingat kompleksitas dan beragamnya aktivitas dan pengelolaan madrasah sebagai institusi pendidikan, maka dalam penelitian ini dipilih sampel komponen utama kegiatan madrasah. Langkah ini diambil mengingat heterogenitas karakteristik, jumlah madrasah, guru, siswa, orang tua, tokoh agama/kyai, dan para *stakeholder* lainnya yang berkepentingan terhadap madrasah.

3. Subyek Penelitian

Subyek dan sumber data penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap madrasah. Sedangkan data yang dihimpun meliputi ragam persepsi, keyakinan serta aksi yang terkait dengan pengelolaan dan aktivitas madrasah. Untuk kepentingan sistimatisasi pengumpulan data maka sumber informasi dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam; (1) jaringan sumber informasi kunci (*key informan*), dan (2) dan jaringan informasi pendukung. Jaringan informasi utama atau *key actor* yang diwawancarai adalah para siswa, guru, kepala sekolah yang dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan aspek kualitasnya, yaitu terkait dengan penguasaan subyek pada tema atau obyek penelitian. Sedangkan jaringan informasi pendukung adalah para tokoh agama/tokoh masyarakat, dunia kerja, lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki keterkaitan langsung dengan madrasah. Untuk mempermudah pengumpulan serta kualitas data maka dilakukan pemilihan informan dari masing-masing madrasah yang dipilih dengan teknik sampel acak sederhana (Noeng Muhadjir, 2002), yaitu menetapkan beberapa madrasah yang ditentukan sesuai representasi dan kluster madrasah yang ada di wilayah Kudus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi: observasi partisipatori, wawancara mendalam, dokumentasi, dan angket.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menjamin agar data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan observasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka mutlak dilakukan pemeriksaan keabsahan data (*trustworthiness*). Menurut Lincoln & Guba (1985) ada empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data; (1) *credibility*- derajat kepercayaan; (2) *transferability* -keteralihan; (3) *dependability* – kebergantungan; dan (4) *confirmability*- kepastian⁷. Teknik yang digunakan dalam pemeriksaan keabsahan data atau membangun *trustworthiness* dalam penelitian ini meliputi: (1) *Prolonged engagement*, (2) *Persisten observation*, (3). *Triangulation*, (4) *Peer debriefing*, (5) *Referential adequacy*, (6) *Negative case analysis*, (7) *Member checks*. (Lincoln & Guba:1985)

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini selanjutnya dianalisis secara induktif dengan menggunakan *analisis* kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan berbagai fenomena pengelolaan dan aktivitas madrasah secara verbal. Adapun langkah-langkah yang ditempuh secara sekuensial adalah sebagai berikut : deskripsi – kategorisasi - spesifikasi - hipotesis-hipotesis – dan kesimpulan/temuan.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kudus adalah sebuah Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 42.516 ha. (1.3% dari luas propinsi Jawa Tengah) terdiri dari 9 Kecamatan, 9 kelurahan dan 123 desa dengan jumlah penduduk 730.754 jiwa (BPS:2005). Ada beberapa predikat yang diberikan untuk Kudus; kota industri, kota kretek, kota jenang, kota santri, dan kota wali. Untuk predikat pertama,

⁷Term ini, menurut Lincoln and Guba (1985), secara berurutan sinonim atau ekuivalen dengan term yang digunakan dalam penelitian konvensional; *internal validity*, *external validity*, *reliability*, dan *objectivity*.

kedua dan ketiga esensinya adalah sama bahwa kota ini penghasilan atau mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah dari usaha atau industri. Predikat kota kretek merujuk pada sebagian besar industri yang ada di Kudus menghasilkan produk berupa rokok. Sebagai kota jenang karena di kota ini banyak industri (*home industry*) yang memproduksi makanan/kue berupa jenang khas Kudus. Predikat sebagai kota industri diberikan karena sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor industri dan jasa.

Meskipun substantif memiliki konotasi sama, secara kultural dan historis predikat kota santri dan kota wali sering dibedakan. Predikat kota santri didasarkan atas fakta bahwa masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Islam⁸ terkenal memiliki tradisi yang bersumber dan terkait dengan Islam. Tradisi itu sejak lama dilakukan oleh para pendiri dan sesepuh Kudus. Sedangkan predikat kota wali lebih didasarkan atau dikaitkan dengan eksistensi dua tokoh besar penyebar agama Islam (*waliyullah*), yaitu Sunan Kudus (Ja'far sodiq) dan Sunan Muria (Umar Said), yang keduanya dimakamkan di Kudus. Berdasarkan hasil penelitian tim dari UGM, Sunan Kudus disepakati sebagai tokoh sentral berdirinya kota Kudus. Sebagaimana diketahui Sunan Kudus adalah salah satu dari sembilan wali penyebar Islam di Jawa. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa berdirinya Kudus (23 September 1549) tidak bisa dilepaskan dari peran dan pengaruh tokoh agama yang sekaligus dikenal sebagai saudagar.

Dari beberapa predikat tersebut, dalam perkembangannya kemudian mengerucut menjadi dua sebutan utama, yaitu kota industri dan kota santri. Dua term yang dalam beberapa hal sering dipersepsi sebagai dua hal berbeda atau bahkan bertentangan. Industri dipersepsi sebagai simbol kemajuan atau modernitas dan santri sering diasosiasikan dengan ortodoksi, konservatif atau tradisional. Stigma bahwa *santri anti kemajuan dan hal-hal yang bersifat modern* sering dilontarkan oleh berbagai pihak Namun untuk konteks Kudus, dua hal tersebut berusaha untuk disinergikan. Hal ini tercermin dari berbagai gagasan yang dilontarkan oleh berbagai kalangan pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat. Inti dari berbagai pemikiran tersebut adalah bahwa pembangunan di Kudus tidak boleh lepas dari akar historisnya. Sebagaimana tercermin dalam rumusan visi Kudus; "Terwujudnya masyarakat sejahtera yang relegius, berkeadilan dan mandiri dalam hubungan yang kondusif didukung industri, perdagangan dan pertanian yang berwawasan lingkungan" (Renstra Kabupaten

⁸ Dari jumlah penduduk 730.754 tercatat 692.270 orang (95%) memeluk agama Islam, selebihnya Protestan 8.338 (1.14), Katolik 7.734 (1.05), Hindu 220 (0.03), dan Budha 1.198 (0.16). (Sumber: *Profil Pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2005*)

Kudus 2003-2008). Implisit rumusan visi tersebut menghendaki berbagai upaya untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran masyarakat tidak boleh lepas dari nilai-nilai kultural dan religius.

Sebagai kota santri, kota ini memiliki lembaga pendidikan Islam yang relatif banyak baik lembaga pendidikan formal maupun non formal. Menurut data dari *Cermin* (2005) tercatat hampir ada ratusan jumlah pesantren yang tersebar diberbagai wilayah desa/kecamatan. Indikator lain yang memperkuat predikat Kudus sebagai kota santri adalah banyaknya institusi pendidikan Islam formal dalam bentuk madrasah, mulai dari MI–MTs–MA (lihat tabel 1). Jumlah tersebut tidak termasuk lembaga pendidikan Islam formal dalam format sistem persekolahan, seperti SD/SMP/SMA swasta yang dikelola oleh yayasan-yayasan Islam. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat perbandingan jumlah sekolah dan madrasah serta siswanya. Data tersebut tidak termasuk madrasah diniyah yang tersebar hampir di setiap pelosok kampung. Madrasah yang termasuk dalam tabel tersebut adalah madrasah yang menggunakan kurikulum pemerintah (DEPAG).

No	Komponen	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA ⁹	SMK
1	Sekolah	474	133	44	56	18	27	11
2	Siswa	67.077	21.000	21.062	19.077	10.393	9.810	7.527
3	Guru	3.819	1.641	1.342	1.485	697	840	433

Tabel 1 : Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis/Tingkatan Sekolah/Madrasah

2. Identifikasi Problematika MA

Berbagai perubahan dan/atau perkembangan madrasah seperti telah dipaparkan pada bab II, tersirat adanya usaha untuk reformasi, restrukturisasi serta transformasi sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Tujuan utama dari ragam perubahan tersebut adalah pada keinginan untuk meningkatkan kualitas dan mensejajarkan madrasah dengan sistem persekolah (sekolah umum). Meskipun demikian secara jujur harus diakui bahwa sampai saat ini kesan keteringgalan masih saja belum dapat dihapuskan, sehingga citra madrasah sebagai “sekolah kepalang tanggung” masih sulit untuk dihilangkan.

⁹ Dari 27 MA yang ada di Kudus hanya 2 MA yang berstatus negeri, selebihnya (25 MA) berstatus swasta.

Dari penelitian ini teridentifikasi problem madrasah, yang secara umum dapat dipetakan sebagai berikut :

a. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Faktor utama minimnya sarana dan prasarana pendidikan pada madrasah adalah karena keterbatasan sumber dana. Meskipun di beberapa MA dalam kurun waktu terakhir ini sudah banyak yang kondisi sarana dan prasarana semakin baik, namun masih banyak, khususnya pada madrasah swasta yang diselenggarakan di dalam gedung yang masih jauh dari memadai baik kuantitas maupun kualitasnya. Bahkan di beberapa MA masih ada bangunan ruang kelas dan berbagai fasilitas fisik pendukung masih jauh dari harapan, bahkan terkesan kumuh. Hal ini terjadi karena tingginya animo siswa masuk MA kurang seimbang dengan kemampuan penyediaan fasilitas.

Berdasarkan identifikasi peneliti, paling tidak ada tiga faktor dominan penyebab tingginya animo masyarakat memilih MA. (1) **Motivasi agama** – belajar di MA sama dengan belajar agama. Dengan belajar di MA para orang tua berharap kelak anaknya bisa memperoleh pengetahuan agama yang bagus dan juga pengetahuan umumnya. Bagi setiap muslim belajar agama dan menyebarkan kepada orang lain adalah wajib hukumnya. Oleh karena itu, bagi sebagian besar orang Islam lembaga pendidikan yang mengajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum secara seimbang menjadi alternatif pilihan untuk tempat menyekolahkan anaknya. Motivasi inilah yang kemudian melahirkan keyakinan bahwa madrasah sebagai pilihan untuk belajar adalah bagian dari ibadah, karena di MA para siswa akan belajar agama sebagai mata rantai penyebaran dan pelestarian nilai-nilai Islam yang diyakini. (2) **Beaya pendidikan murah**. Beaya pendidikan yang murah pada madrasah menjadi salah satu daya tarik orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Murahness beaya pendidikan ini karena secara historis lembaga pendidikan ini adalah modernisasi dari lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren, dimana mayoritas santri/siswa berasal dari kelompok muslim pedesaan (utamanya petani) yang secara ekonomis dari kalangan menengah ke bawah. Karena pada awalnya belajar di lembaga pendidikan ini motivasi utamanya adalah belajar ilmu agama maka secara kultural tidak pernah ada transaksi secara eksplisit tentang beaya pendidikan. Persepsi ini masih sangat mewarnai pola pikir sebagian besar masyarakat muslim, bahwa belajar di madrasah masih dianggap sebagai belajar agama, sehingga wajar manakala beaya pendidikannya gratis atau setidaknya murah. Disamping persepsi tersebut, keadaan sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang lemah membuat partisipasi dan kontribusi finansial orang tua murid menjadi rendah. Bahkan dalam beberapa

kasus madrasah harus mencari dana dari donatur untuk membantu siswa yang tidak mampu. (3) **Keterbatasan daya tampung SMA/MA negeri.** Harus diakui bahwa pilihan untuk belajar di madrasah adalah pilihan kedua setelah tidak diterima pada SMU/MA negeri favorit. Fakta inilah yang menjadi salah satu sebab proses pembelajaran di MA kurang lancar, karena *input* siswa untuk MA secara akademik tidak bisa disejajarkan dengan *input* siswa untuk SMU, yang rata-rata memiliki nilai/prestasi akademik yang bagus, terutama mata pelajaran umum.

Hampir semua MA di Kudus, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dijalankan dengan dukungan dana yang minim bahkan jauh dari mencukupi untuk proses pembelajaran yang standar. Sumber dana utama adalah dari SPP/ *syabriyah* siswa yang nominalnya kecil (berkisar antara Rp. 50.000 sampai Rp. 70.000 perbulan) dan dari donatur. Keadaan tersebut berakibat pada rendahnya gaji/honor mengajar bagi para guru. Rendahnya honor guru tersebut mendorong para guru membuat usaha sambilan di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Bahkan tidak jarang beberapa guru menganggap pekerjaan mengajar adalah sebagai kegiatan tambahan karena kegiatan utama adalah berdagang atau usaha wiraswasta lainnya. Mengajar di madrasah bagi mereka adalah panggilan suci (beribadah) untuk menyampaikan ilmu yang telah diperoleh kepada orang lain. Kondisi ini hampir merata pada seluruh MA, karena jumlah madrasah yang berstatus negeri di Kudus hanya 2 buah dari 27 MA yang ada.

b. Kurikulum yang belum menjawab kebutuhan

Dengan status barunya ini, kurikulum MA ditetapkan sama persis dengan kurikulum SMU. Perbedaannya terletak pada; (1) untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMU diberikan dalam satu paket oleh satu guru, sedangkan di MA materi PAI dibedakan kedalam lima mata pelajaran; (a) Qur'an-hadits, (b) Aqidah-Akhlak, (c) Fiqh, (d) Sejarah Kebudayaan Islam, dan (e) Bahasa Arab. Di hampir semua MA swasta, lima mata pelajaran tersebut ditambah (diperkaya) dengan beberapa mata pelajaran sesuai dengan visi masing-masing MA, seperti *nabwu, shorof, balagob, khot/insya'*, dan pengajaran kitab kuning seperti di pesantren. Tujuannya adalah agar para siswa penguasaan agamanya lebih baik. Tidak hanya sekedar itu, di beberapa MA swasta seperti MA Qudsiyah dan MA TBS visi dan keunggulan yang ditawarkan kepada masyarakat adalah kompetensi lulusan yang mampu membaca dan menguasai kitab kuning. Karena disadari oleh semua pengelola MA, pengajaran PAI hanya seperti yang ada pada kurikulum yang ditetapkan oleh DEPAG tanpa pengajaran pengayaan hampir dapat dipastikan lulusan MA penguasaan pengetahuan agamanya akan minim. (2)

Karena materi PAI dijabarkan menjadi lima mata pelajaran dan masih ditambah pengayaan materi agama maka secara otomatis ada penambahan jam pelajaran. Sementara jam masuk dan pulang untuk siswa MA sama seperti di SMU. Keadaan inilah yang kemudian menghadapkan MA swasta pada pilihan yang sulit, yaitu mengurangi jam tatap muka mata pelajaran kurikulum nasional dan mengisinya dengan pengajaran kitab kuning. Langkah ini ditempuh karena dalam pandangan para pengelola MA swasta, bahan ajar PAI kurikulum nasional hanya memberi pengetahuan agama sangat elementer.

Dalam bidang keilmuan, problem lain yang dihadapi oleh madrasah adalah masih kuatnya cara pikir dikhotomis di kalangan masyarakat luas maupun para pihak yang terlibat dalam pengelolaan MA. Pandangan yang menyatakan bahwa antara 'agama' dan 'ilmu', 'madrasah' dan 'sekolah' adalah dua entitas yang berbeda sehingga tidak bisa dipertemukan. Keadaan tersebut kemudian meemunculkan fenomena: (1) pengajaran agama Islam di madrasah dan bahkan di lembaga pendidikan Islam lain masih kuat bersifat normative-tekstual. Hal ini berakibat seolah ilmu agama adalah terpisah dari perkembangan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, hukum, dan humaniora. (2) Pendidikan ilmu-ilmu yang masuk kategori *science* (Ilmu Pengetahuan Alam) pada kenyataannya secara substantif terpisah dari ilmu agama. Hubungan antara keduanya terkesan 'dipaksakan' karena pada kenyataannya baik dalam pembelajaran maupun buku teks sesuai kurikulum DEPAG ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis hanya ditempelkan pada setiap materi temuan atau keberhasilan IPTEK, sehingga lebih terkesan hanya untuk menjustifikasi.

Masih terkait dengan bidang keilmuan, kelemahan lain yang dihadapi oleh hampir semua MA, terlebih MA swasta, adalah kurangnya perhatian terhadap pengajaran bidang studi umum. Bahkan di beberapa MA yang kuat pada orientasi *salaf*, mata pelajaran umum khususnya bidang *science* dianggap kurang penting, sehingga diposisikan sebagai pelajaran pelengkap atau tambahan. Bahkan dapat penulis katakan penerimaan terhadap kurikulum DEPAG tidak sepenuh hati. Pada kenyataannya mereka masih menganggap MA adalah sekolah agama, sehingga yang diprioritaskan adalah penguasaan pengetahuan agama. Hal ini berakibat di beberapa MA apresiasi terhadap bidang studi umum kurang baik, seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi dan lain-lain.

Upaya untuk mengubah cara pandang tersebut sesungguhnya telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan strategis yang dilakukan oleh DEPAG, yang tujuannya utamanya adalah menghilangkan dikhotomi dan disorientasi ilmu. Diantaranya melalui pengembangan program MAFIKIBB (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi dan Bahas Inggris) dengan nuansa Islam

dan program pelajaran agama yang bernuansa IPTEK. Tujuan dua program ini adalah untuk menjembatani *gap* antara pendidikan agama dengan bidang studi umum dan untuk memberikan nuansa IPTEK ke dalam mata pelajaran agama. Perpaduan konsep MAFIKIBB dengan nuansa agama dan konsep agama dengan nuansa IPTEK dimaksudkan agar diserapnya nilai-nilai MAFIKIB yang agamis, dan nilai-nilai agama yang kontekstual dalam perilaku siswa, sebagai wujud penghayatan dan pengabdian kepada keagungan Allah SWT.

Dengan struktur kurikulum MA 100% sama dengan kurikulum SMU para lulusan MA, terutama yang negeri dan swasta non *salafiyah* mengalami perubahan orientasi dalam melanjutkan perkuliahan. Pada umumnya mereka memilih melanjutkan kuliah di PTN/PTS dan baru mendaftar di PTAI (UIN, IAIN, STAIN) setelah tidak lulus tes masuk PTN. Hal ini berbeda dengan para alumni MA *salafiyah* yang sejak awal, bila mampu/mau melanjutkan mayoritas ingin kuliah di PTAI. Atas dasar realitas dan kecenderungan bahwa sebagian besar siswa MA ingin melanjutkan kuliah di PTN/PTS umum para pengelola MA di Kudus banyak yang membuka program-program studi umum. Sejak awal tahun 1990-an sebagian besar MA di Kudus mulai mengembangkan program-program umum, seperti program IPA, program IPS, program Bahasa serta program Ketrampilan, disamping tentu tetap mempertahankan program agama yang sudah ada sejak lama dan bahkan menjadi ciri khasnya.

Perubahan tersebut pada satu sisi telah membawa perubahan wawasan akademik dan keilmuan pada pendidikan MA, dimana MA tidak lagi berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi sekaligus juga telah mengambil peran ganda, yaitu sebagai lembaga pendidikan umum. Perubahan ini telah menjadikan MA tidak lagi hanya terfokus pada penyiapan lulusannya untuk memasuki jurusan/ program agama di PTAI, tetapi juga dituntut untuk menyiapkan *row input* yang akan memilih jurusan/program studi umum di PTN/PTS. Fakta inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan orientasi akademik di hampir semua MA di Kudus, kecuali MA swasta yang tetap mempertahankan orientasi *safali*. Fakta ini dapat dilihat dari lemah dan kurangnya perhatian terhadap pengembangan program agama, karena konsentrasi pembelajaran lebih difokuskan pada peningkatan program/bidang studi umum, terutama mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.

Sampai saat ini *image* bahwa MA identik dengan sekolah agama belum atau sulit untuk dihapus. Masyarakat tetap yang menghendaki lulusan MA harus menguasai ilmu-ilmu keagamaan serta ilmu pendukungnya, seperti bahasa Arab. Oleh karenanya keunggulan atau kebanggaan seorang lulusan MA adalah pada kemampuannya dalam membaca, menulis, dan memahami bahasa Arab, yang

merupakan kunci untuk memahami al-Quran dan Hadits serta kitab-kitab keagamaan klasik. Namun pada kenyataannya kemampuan bahasa Arab para lulusan MA semakin menurun, kalau tidak mau dikatakan sangat lemah. Data tentang ini dapat dilihat dari hasil tes seleksi penerimaan calon mahasiswa baru STAIN Kudus; 90% peserta tes kemampuan bahasa Arabnya di bawah standar. Dan secara umum kemampuan (BTQ) Baca Tulis al-Qur'an juga masih dibawah standar untuk belajar di STAIN yang nota bene bidang kajiannya adalah *Islamic studies*.

Berangkat dari kondisi ini, nampaknya sudah mendesak untuk dilakukan reorientasi sistem pendidikan pada MA. Paling tidak harus ada ketegasan tentang kompetensi apa dan mau dibawa kemana para lulusan MA ke depan. Karena pada kenyataannya lulusan MA tidak mampu lagi memenuhi harapan masyarakat. Langkah yang perlu ditempuh dalam reorientasi bidang akademik ini adalah penyeimbangan dalam pengembangan kurikulum MA antara yang berorientasi pengembangan akademik yang berorientasi pada pengembangan profesi keagamaan. Implementasi untuk ide ini bisa ditempuh melalui pembukaan pembukaan program-program studi bidang profesi keagamaan dengan pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan ilmu-ilmu agama secara maksimal.

c. Keterbatasan Sumberdaya Manusia

Dari penelitian ini dapat diidentifikasi berbagai keterbatasan sumberdaya manusia MA, terutama yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas MA.

a. Kualitas guru yang rendah

Secara umum kondisi tenaga guru di madrasah saat ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori. (1) Guru yang *unqualified/underqualified*. Artinya guru tersebut belum mempunyai kualifikasi mengajar seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku (minimal harus lulusan S1). (2) guru layak tapi *mismatch*. Artinya latar belakang pendidikannya tidak cocok dengan bidang studi yang diajarnya. Misalnya lulusan Fakultas Tarbiyah jurusan PAI mengajar matematika, atau lulusan Fakultas Syariah mengajar IPS dan seterusnya. (3) guru yang layak (*qualified*) dan mengajar sesuai bidang/kompetensinya.

Jika dibandingkan data guru MA secara nasional, hampir 60 % guru MA negeri termasuk kategori tidak layak dan angka akan melonjak menjadi 80 % pada madrasah swasta. Sedangkan yang *mismatch* sebesar 20 %. Jadi hanya sekitar 20 % guru dari yang benar-benar layak dan memenuhi

kualifikasi mengajar (DEPAG, 2004). Data ini tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada MA di Kudus. Problem dan tantangan ini semakin berat bila melihat kualitas bidang studi umum yang masih sangat lemah, karena bidang studi ini ditangani oleh guru-guru dalam kategori *mismatch*. Oleh karena itu wajar bila hasil UN bidang studi umum pada madrasah perolehan nilai masih relatif rendah, meskipun prosentasi kelulusan rata-rata diatas 95%, dibanding dengan sekolah umum.

b. Rendahnya Kemampuan Manajerial Pengelola MA.

Seperti halnya keadaan kualitas guru, kualitas tenaga kependidikan lain yang berperan dalam pengelolaan madrasah, seperti kepala madrasah dan tenaga pengawas juga sangat rendah. Tidak jauh beda dengan data secara nasional, sebagaimana dipublikasikan melalui data EMIS tahun 2004, terdapat 4003 kepala madrasah dengan latar belakang pendidikan sarjana (S1) 87,5 %, S2 5,8 % dan sisanya 6,6 % dibawah S1 (DEPAG, 2004). Hal ini juga terjadi pada sebagian besar madrasah di kabupaten Kudus. Secara formal kondisi ini sebenarnya cukup memadai, tetapi dari sudut kualitas kepemimpinan dan kemampuan manajerial masih sangat lemah, karena pada umumnya mereka adalah lulusan dari UIN/IAIN/ STAIN atau perguruan agama Islam lainnya. Artinya dari dimensi pengetahuan keagamaan tidak perlu diragukan lagi, tetapi dari dimensi kemampuan leadership dan manajerial belum seperti diharapkan. Hal ini wajar, karena selama menuntut ilmu di PTAIN atau perguruan agama Islam lainnya tidak semua kurikulum di perguruan tinggi tersebut ada mata kuliah leadership dan manajemen. Bahkan lebih parah lagi banyak para kepala madrasah tersebut berasal dari mantan pejabat administrasi pada Kantor DEPAG Kabupaten atau Wilayah untuk kepentingan rotasi jabatan. Akibatnya banyak madrasah yang dikelola dengan penekanan aspek administratif dari pada dimensi akademisnya. Hal ini berakibat sebagian MA dikelola secara tidak proporsional dan bernuansa sangat birokratis. Untuk MA swasta keadaan tersebut diperparah dengan masih kuatnya kultur primordial dan paternalistik di kalangan pimpinan dan sepeuh madrasah.

Kondisi yang sama juga terjadi pada mutu tenaga pengawas. Sudah bukan rahasia lagi bahwa, sebagian besar tenaga pengawas madrasah adalah berasal dari tenaga administratif, seperti mantan kepala seksi atau kepala madrasah yang mutasi menjadi tenaga pengawas dalam rangka memperpanjang usia dinas aktif. Dapat dibayangkan, kualitas pengawasan seperti apa yang dapat dihasilkan. Dalam kenyataannya para tenaga pengawas tersebut tidak lebih hanya memainkan peran dan fungsi sebagai 'inspektur

administratif dan tidak sempat mensupervisi masalah substansi dan proses pembelajaran yang berlangsung pada pendidikan MA.

d. Orientasi Akademik dan Dikhotomi Ilmu

Harus diakui, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sampai saat ini masih didominasi oleh dunia Barat yang sekuler, dalam banyak hal bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dunia timur. Madrasah sebagai salah satu varian pendidikan yang ada di negeri ini, menghadapi kenyataan tersebut memiliki tugas yang sangat berat dan dihadapkan pada suatu dilema. Hal ini lebih disebabkan karena pada awalnya lembaga pendidikan ini adalah institusi keagamaan. Sesuai tuntutan perkembangan, tugas madrasah tidak hanya mengajarkan IPTEK namun juga harus melengkapinya dengan iman dan Taqwa (IMTAQ). Itulah kesimpulan dari wawancara peneliti dengan para kepala sekolah, pengurus yayasan dan para guru MA yang intinya adalah kegelisahan dan sekaligus obsesi mereka dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Meskipun mereka sepakat akan pentingnya lulusan MA yang menguasai IPTEK dan IMTAQ, namun dalam ilplementasinya masih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut kemudian melahirkan cara pandang yang berbeda tentang bagaimana mencapai kompetensi tersebut.

Dari sisi status kelembagaan MA di Kudus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu negeri dan swasta. Dari 27 MA yang ada, semuanya menggunakan atau berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh DEPAG. Meskipun menggunakan kurikulum DEPAG, berdasarkan visi dan orientasi akademiknya, MA di Kudus dapat diklasterkan menjadi tiga klaster besar:

a. MA Seratus Persen Sama dengan SMA

MA yang masuk kategori ini, mata pelajaran dan jumlah jam/tatap muka selain mata pelajaran PAI seratus persen sama dengan SMA. Perbedaannya hanya jumlah tatap muka untuk mata pelajaran yang tergabung dalam rumpun PAI, dimana untuk MA lebih banyak. Hal ini terjadi karena, di SMU mata pelajaran PAI hanya diberikan dalam satu paket mata pelajar yang diajarkan oleh satu orang guru, yaitu guru agama. Sedangkan di MA mata pelajaran PAI dipecah menjadi lima mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang berbeda. Meskipun dipecah menjadi lima mata pelajaran, namun pada kenyataannya, kemampuan atau penguasaan pengetahuan agama siswa masih jauh dari harapan. Cuma bila dibandingkan dengan anak SMU kemampuan bidang agama relatif sedikit lebih baik. Hal ini terjadi karena, keinginan mayoritas siswa MAN adalah melanjutkan kuliah ke PTN/PTS. Biasanya mereka melanjutkan kuliah ke Perguruan Tinggi Agama Islam

(PTAIN/S) manakala tidak diterima di PTN (berdasarkan penjelasan Kepala MAN 1 Kudus (Drs. Zahid, MA pada tanggal 12 September 2006),

Orientasi inilah yang kemudian menjadikan mereka lebih serius mendalami mata pelajaran umum, terutama yang diujikan dalam Ujian Nasional. Fakta ini satu sisi memberi peluang dan kesempatan yang sama bagi para lulusan MA untuk melanjutkan kuliah di PTN/PTS seperti halnya lulusan SMU, yang akhirnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesempatan kerja. Namun di sisi lain, bila tidak ada pengajaran pengayaan bidang agama Islam, kemampuan dan penguasaan ilmu agama menjadi sangat kurang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat maupun orang tua pada umumnya. Apapun statusnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan orang tua, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya, mereka masih beranggapan bahwa MA adalah sekolah agama. Mereka berharap, lulusan MA memiliki kemampuan yang standar untuk bisa menjadi tokoh/penyebarnya di masyarakat.

Di kabupaten MA jenis ini hanya dua yaitu MAN 1 dan MAN 2 dengan jumlah siswa/siswi sebanyak 2139 siswa, dengan rincian; MAN 1; 893 siswa, MAN 2 1246 siswa. Bila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan siswa MA di Kab. Kudus, siswa MA jenis ini mencapai 22.06%.

b. MA Swasta Berorientasi *Salafi*.

Meskipun berpedoman dan menggunakan kurikulum DEPAG, namun pembelajaran bidang PAI di MA jenis ini tidak menggunakan buku teks yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan karena para pengelola MA ini memandang kurikulum tersebut terlalu ringan, terutama bila dikaitkan dengan orientasi akademik, visi – misi, dan kompetensi yang ingin dicapai. Secara tegas dinyatakan bahwa kompetensi lulusan MA ini adalah kemampuan membaca teks/kitab berbahasa Arab. Dalam banyak hal MA ini sama persis dengan pondok pesantren, baik kompetensi maupun sistem pembelajaran bidang studi agama Islam. Sehingga tidak berlebihan kalau MA ini sesungguhnya adalah pesantren yang menggunakan sistem klasikal dan model penjenjangan, dua hal yang menjadi ciri pokok sistem persekolahan model Barat. Di Kabupaten Kudus MA jenis ini ada dua buah, yaitu MA Qudsiyah dan MA TBS (*Tasywiqut Thulab Salafi*). Kedua MA tersebut berlokasi tidak jauh dari monumen penyebaran Islam oleh para walisongo berupa Masjid dan Menara Kudus (*Masjidil Aqsbo*). Fakta inilah yang kemudian menjadikan dua MA ini sebagai icon masyarakat Kudus, bila berbicara masalah pendidikan dan penyebaran Islam.

Kedua lembaga tersebut dikelola oleh sebuah yayasan yang mengelola lembaga pendidikan MI, MTs dan MA. Secara menegerial ketiga lembaga tersebut dikelola dibawah satu kendali, dengan ulama' sebagai figur sentralnya. Pengelolaan dalam satu manajemen ini tidak hanya untuk kepentingan efisiensi dan efektifitas madrasah, namun lebih dari itu adalah untuk penjaminan mutu *input* maupun *output*. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan siswa baru untuk masing-masing jenjang dengan model tertutup. Artinya, calon siswa yang diterima hanyalah siswa yang berasal dari jenjang pendidikan di bawahnya dari yayasan tersebut. Untuk lulusan SD/MI di luar yayasan Qudsiyah tidak bisa langsung masuk atau diterima di kelas 1 MTs, namun diterima di kelas 5 MI. Jadi untuk bisa masuk kelas 1 MTs seorang calon siswa harus menunggu atau belajar dua tahun terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan kemampuan dasar akademik yang dipersyaratkan. Bahkan untuk jenjang MA, hampir semua MTs (apalagi SMP) dari luar tidak bisa diterima untuk jenjang MA. Meskipun ada peluang untuk mendaftar pada jenjang tersebut, namun pada kenyataannya banyak peserta yang tidak bisa lulus karena persyaratan dan tes masuk yang ditetapkan standarnya terlalu tinggi untuk tingkatan sekolah/madrasah tersebut pada umumnya. Hal yang sama juga diterapkan untuk MA TBS, perbedaannya di TBS bagi calon siswa yang tidak lulus tes masuk MA mereka diberi kesempatan untuk mengikuti program persiapan, yang disebut dengan Madrasah Persiapan Aliyah (MPA). Program ini ditempuh selama satu tahun, bila lulus tes pada akhir program tersebut maka dapat melanjutkan atau diterima di kelas satu MA, bila tidak dan ingin tetap masuk MA maka dia harus mengulang program MPA selama satu tahun lagi. Tujuan program ini adalah untuk menyiapkan para siswa untuk menghadapi, tidak hanya kultur belajar yang berbeda, namun yang lebih penting adalah menyiapkan kemampuan akademik yang dalam banyak hal dibawah standar yang ditetapkan oleh MA TBS. Oleh karena itu materi ajar program MPA ini berisi ilmu bantu (ilmu alat) yang dibutuhkan untuk mendalami dan mengkaji (ilmu-ilmu) Islam. Materi tersebut meliputi; Bahasa Arab, *Nabwu Shorof*, *Balaghob*, *Insyah*, *Falaq*, Ilmu Ahlak (*ta'limul Muta'alim*), Fiqh, Tauhid, Hadits, Tafsir Al-Qur'an, Bahasa Inggris, Matematika. Selain matematika dan bahasa Inggris, sistem pembelajarannya menggunakan model pesantren dimana kitab-kitab berbahasa Arab menjadi acuan dan sekaligus menjadi kurikulumnya. (wawancara dengan bapak Suwanto, BA Waka Kurikulum MA TBA)

Karena menggunakan standar yang tinggi oleh karenanya tidak gampang untuk bisa belajar di lembaga tersebut, namun faktanya jumlah siswa di dua MA tersebut relatif banyak. Untuk tahun ajaran 2006/2007 ini jumlah siswa MA Qudsiyah 498 siswa dan TBS 1037 siswa. Bila dijumlah siswa di dua MA tersebut 1535 orang. Jumlah ini hampir mendekati jumlah siswa/siswi di dua MAN yang ada di Kudus. Artinya, meskipun persyaratan dan standar kompetensinya tinggi, ternyata animo untuk mendaftar di MA jenis *salafi* ini cukup tinggi, yaitu mencapai 15.83% (jumlah keseluruhan siswa MA di Kabupaten Kudus adalah 9.694)

Meskipun menggunakan dan berpedoman pada kurikulum DEPAG, namun MA jenis ini tidak mewajibkan siswanya untuk mengikuti Ujian Nasional. Keikutsertaan dalam UN lebih bersifat sukarela, meskipun demikian pada setiap awal tahun kelas tiga, pihak madrasah mengirim surat kepada orang tua siswa yang intinya menanyakan apakah putranya akan mengikuti UN atau tidak. Bila ikut maka akan dipersiapkan secara khusus, bila tidak maka yang bersangkutan hanya akan mendapatkan Ijazah (swasta) dari madrasah tersebut.

Karena orientasi akademik dan keunggulan dibidang penguasaan ilmu agama Islam dengan standar kemampuan membaca kitab kuning, maka secara otomatis membutuhkan penambahan jam pelajaran untuk materi PAI. Langkah yang ditempuh dalam hal ini adalah; (1) untuk mata pelajaran PAI tidak menggunakan kurikulum dan buku ajar yang dikeluarkan oleh DEPAG tapi langsung menggunakan kitab kuning dengan materi sesuai mata pelajarannya. (2) Karena banyaknya materi dan kitab kuning yang diajarkan tentu hal ini membutuhkan jam tambahan. Langkah yang ditempuh dalam hal ini adalah dengan mengurangi jam tatap muka mata pelajaran kurikulum DEPAG yang tidak diujikan pada UN, utamanya yang masuk kategori ilmu-ilmu sosial. Adapun mata pelajaran tambahan (kurikulum lokal) dan kitab kuning yang dijadikan acuan di dua MA tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 2).

No	Mata Pelajaran	Judul Kitab	
		MA QUDSIYAH	MA TBS
1	Tafsir	<i>Tafsir Jalalain</i>	<i>Tafsir Jalalain</i>
2	Ilmu Tafsir	<i>Tasrikul Yasir</i>	-
3	Hadits	<i>Bulughul Marom</i>	<i>Bulughul Marom</i>
4	Fiqh	<i>Tabrir</i>	<i>Fathul Mu'in</i>
5	Qowaid Fiqh	<i>Al-Hidayah at-Tholibah</i>	<i>Al-Faroidul Bahiyah</i>
6	Ushul Fiqh	<i>Lubabul Ushul</i>	<i>Lubabul Ushul</i>
7	Tauhid	<i>Tuhfatul Murid</i>	<i>Umum Barobah</i>
8	Akhlak/Tasawuf	<i>Kifayatul Atqiyah</i>	<i>Qifayatul Atqiyah</i>
9	Mustolah Hadits	<i>Mustolah al-Hadits</i>	-
10	Mantiq	<i>Sulamul Munawaroh</i>	<i>Idbohul Mubhan</i>
11	Ilmu Falaq	<i>Durusul Falaqiyah</i>	<i>Syam sul Hilal</i>
12	Bahasa Arab	-	-
13	Balaghoh	<i>Uqudul Jum'an</i>	<i>Khushul Syriyqoh</i>
14	Nahwu/Shorof	<i>Ibnu Aqil-Syarah alfiyah</i>	<i>Ibnu Aqil-Syarah alfiyah</i>
15	Qiro'ah (<i>Qiro'ab Sab'ab</i>)	<i>Faidhl al-Asani</i>	-
16	Doktrin/Aswaja	<i>Faroid as-Sunniah</i>	<i>Faroid as-Sunniah</i>
17	Ilmu Jiwa	Teks bebas	Diktat
18	Ilmu Pendidikan	Teks Bebas	-
19	Muthola'ah kitab (kajian/ baca kitab)	Teks bebas/kondisional	<i>Fathul Qorib</i>

Tabel 2: Daftar Mata Pelajaran dan Kitab Acuan Pembelajaran Agama di MA Salafi¹⁰

c. MA Swasta dengan Pengayaan Pelajaran Agama.

MA jenis jumlahnya paling banyak, yaitu 23 MA dengan jumlah siswa 6020 orang. Meskipun ada pengayaan materi bidang agama Islam, namun MA jenis ini lebih berorientasi pada penguasaan kurikulum nasional DEPAG. Secara geografis MA kategori ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kudus. Dari sudut lokasi keberadaanya MA jenis ini dapat dipahami sebagai pemerataan pendidikan, yaitu berada dekat dengan lokasi siswa, sehingga secara ekonomis memberi kesempatan belajar dari kelompok

¹⁰ Disusun berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kurikulum MA Qudsiyah Bp. Nur Cholis dan Waka Kurikulum MA TBS Bp. Suwanto, pada tanggal 2 Nopember 2006).

masyarakat menengah bawah di pedesaan. Meskipun demikian, dari 23 MA tersebut tercatat ada 2 MA yang memiliki karakteristik khusus, terutama bila dikaitkan dengan orientasi akademik dan ideologis - MA Mu'alimat NU dan MA Banat Kudus. Kedua MA tersebut peserta didiknya semuanya perempuan. Bila dibandingkan dengan MA jenis ini maka kedua MA tersebut relatif maju, paling tidak dilihat dari jumlah animo pendaftar (jumlah siswa saat ini; MA Banat 861 siswi dan MA Mu'alimat NU 623 siswi). Kedua MA tersebut terletak di pusat kota (Kecamatan Kota). Pada tataran tertentu MA ini ada kemiripan dengan MA Salafi, namun karena tuntutan terpenuhinya target kelulusan di UN maka MA ini pada akhirnya lebih berorientasi seperti MAN. Secara historis dua lembaga pendidikan ini memiliki sejarah panjang, bahkan merupakan kelanjutan atau konversi dari lembaga pendidikan Islam yang sudah ada pada saat itu.

Pada awalnya MA Mu'alimat NU merupakan lembaga pendidikan calon guru, khusus untuk guru perempuan. Fakta sejarah inilah yang kemudian tetap dipertahankan sampai sekarang, hal ini dapat dilihat dari nama yang dipakai untuk MA tersebut "*Mu'alimat*" (dari akar kata *mu'alim* yang berarti pendidik laki-laki dan *mu'alimat* pendidik perempuan). Tidak hanya namanya saja, secara kurikuler ada mata pelajaran yang khas untuk lembaga pendidikan keguruan, yaitu ilmu pendidikan, ilmu jiwa, dan praktek mengajar. Seperti halnya MA swasta pada umumnya, MA Mu'alimat NU juga mengajarkan mata pelajaran tambahan untuk penguatan materi PAI. Tambahan materi tersebut hampir sama dengan materi tambahan yang ada pada MA *salafi*, namun karena model pembelajaran, visi sekolah, dan motivasi siswi berbeda maka hasil pembelajaran tidak bisa optimal. Bila di MA Salafi pembelajaran agama langsung menggunakan kitab kuning seperti di pesantren, sedangkan untuk MA ini tidak bisa dilaksanakan secara penuh karena berbagai keterbatasan (*input* siswa).

Faktor lain yang menyebabkan tidak maksimalnya pembelajara PAI tambahan di MA ini karena ada persepsi di kalangan siswi bahwa mata pelajaran ini tidak penting karena tidak diujikan pada UN. Hal ini terjadi karena orientasi sebgaiian besar siswi bila telah lulus akan melanjutkan studinya di PTN. Fenomena ini sama dengan apa yang terjadi pada siswa MAN. Mata pelajaran tambahan yang diberikan di dua MA dapat dilihat pada tabel berikut;

No	MATA PELAJARAN	KLS	NAMA KITAB	PENGARANG
1	<i>Qiroatul kitab</i>	2, 3	<i>Uqudul Lijain</i>	Syaikh Muhammad Ibn Umar An-Nawawi
2	Ilmu Tafsir	2,3	<i>al-Tayrihul Yasir</i>	Syaikh Jalaluddin
3	Ushul Fiqh	1,2	<i>Nadhom al-Waroqot</i>	Syaikh Syarofuddin Yahya
4	Balaghoh	1,2,3	<i>Durusul al-Balaghob</i>	Alamuddin Muhammad Yasin Ibn Isa al-Fadani
5	Mantiq	1,2,3	<i>Sarah Sulam Al-Munauroq</i>	Abdutorhman al-Ahdhori
6	Nahwu Shorof	1,2,3	Alfiyah Ibn Malik	Muhammad Bin Abdullah bin Malik Al-Andalusy.
7	Tauhid	2,3	<i>Alhusun al-Hamidyyah</i>	Sayid Husain Afandi
8	Fiqh	1,2,3	<i>Al-Gboyah wa al-taqrib</i>	Abu Bakar as-Suyuthi Syeh Abu Suja'Ahmad Bin Husain
9	Ke-NU-an	1,2,3	Ke-NU-an	Buku Teks dari Ma'arif NU
10	Ilmu Pendidikan	1,2,3	Teks Bebas	-
11	Ilmu Jiwa	1,2,3	Teks Bebas	-
12	Praktek Mengajar	3	-	-

Tabel 3: Daftar Mata Pelajaran Tambahan dan Kitab Acuan Pembelajaran Di MA NU Mu'alimat Kudus

V. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan dan dianalisis tentang implementasi transformasi MA maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Secara politis dan legal formal perubahan madrasah menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam merupakan kemenangan bagi perjuangan umat Islam untuk memperoleh kesetaraan dan kesederajatan dalam bidang pendidikan. Namun transformasi madrasah tersebut dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari berbagai keterbatasannya.

- b. Secara umum kendala yang dihadapi oleh MA dengan statusnya sebagai Sekolah Menengah Umum Berciri khas Islam dapat diidentifikasi sebagai berikut; (a) Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, (b) Kurikulum belum mampu memenuhi kebutuhan, (c) Keterbatasan SDM– kualitas guru dan kemampuan manajerial para pengelola MA rendah, (d) orientasi akademik dan dikhotomi ilmu.
- c. Meskipun 27 MA (negeri dan swasta) yang ada di Kudus menerapkan dan berpedoman pada kurikulum nasional Departemen Agama, namun dalam implementasinya memiliki karakteristik dan orientasi akademik yang berbeda. Secara umum karakteristik MA di Kudus dapat dikategorikan menjadi tiga; (a) MA yang seratus persen sama dengan SMA – yang masuk kategori ini ada dua MA semua berstatus negeri (MAN). (b) MA berorientasi *salaf* – kemampuan agama plus dengan standar kompetensi mampu membaca teks berbahasa Arab (kitab kuning). yang masuk kategori ini ada dua semuanya swasta, yaitu MA Qudsiyah dan MA TBS. (c) MA dengan standar kurikulum DEPAG dengan pengayaan materi PAI – yang masuk kategori ini ada 23 MA semuanya swasta.
- d. Dari berbagai realitas tersebut maka secara umum dapat disimpulkan bahwa transformasi MA menjadi Sekolah Menengah Umum Berciri Khas Islam masih sulit untuk mencapai tujuan sebagaimana diinginkan dalam penetapan kebijakan tersebut, yaitu kesetaraan dalam arti substansial.

2. Rekomendasi/Saran

Berangkat dari data dan realitas pengelolaan MA dalam formatnya sebagai Sekolah Menengah Umum Berciri Khas Islam, maka ada beberapa hal penulis rekomendasikan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut :

a. Pemerintah/Departemen Agama

Perlu dicari formula yang tepat untuk mengakomodir berbagai aspirasi, terutama yang terkait dengan pilihan belajar di MA. Motivasi belajar di MA tidak semuanya sebagai persiapan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi umum (PTN), namun motivasi utama sebagian besar orang tua murid adalah untuk belajar agama sebagai bekal hidup bermasyarakat. Hal ini didasarkan atas realitas bahwa mayoritas siswa MA adalah bersal dari kalangan keluarga yang secara sosial ekonomi menengah ke bawah

dari pedesaan. Oleh karenanya, perlu dirumuskan program-program spesifik yang tidak diberlakukan untuk semua MA di semua daerah.

b. Pemerintah Kabupaten

Perlu dicari formula dan mekanisme yang tepat untuk keterlibatan pemerintah kabupaten, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Langkah ini perlu dan mendesak mengingat sampai saat ini masih terjadi kerancuan berfikir di kalangan birokrat pemerintah Kabupaten, terutama dalam memaknai otonomi urusan pemerintahan. Meskipun MA di bawah DEPAG dan sektor agama adalah urusan pemerintah yang tidak termasuk diotonomikan, namun bukan berarti siswa/siswi madrasah sebagai sesama anak bangsa tidak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dari pemerintah kabupaten. Bukankah mereka adalah bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan secara layak. Langkah kongkrit yang perlu diambil oleh pemerintah Kabupaten adalah alokasi anggaran yang proporsional tanpa harus membedakan antara sekolah dan madrasah.

c. Pihak Pengelola MA.

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan MA harus mau bersikap realistis terhadap keadaan dan tantangan yang ada. Sebaiknya tidak perlu memaksakan diri untuk membuka program yang secara nyata tidak memiliki kualifikasi dan persiapan untuk itu. Ini semua demi menjaga nama baik lembaga pendidikan Islam dan yang lebih penting adalah masa depan peserta didik. Jangan sampai anak didik harus memilih program yang ditawarkan oleh MA yang nyata-nyata SDM, sarana dan prasarana untuk berlangsungnya proses pendidikan yang kurang/tidak berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsohah, Hanum (1999), *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos.
- Azra, Azyumardi (2003), *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, Jakarta, Logos.
- Balnaves, Mark dan Caputi, Peter (2001). *Introduction to Qualitative Research Methodes: An Investigative Approach*. London, Sage Publications.
- Bogdan, Robert C. dan Biklen, Sari Knopp (1982). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Bonstopn. Allyn and Bacon, Inc.

- Bogdan, Robert C., Biklen, Sari Knor. (1982). *Quality Research for Education*, Bostom, Allyn and Bacon, Inc.
- Creswell, John W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approach*. London, Sage Publications.
- Departemen Agama RI (2004), *Sejarah Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika, dan perkembangannya di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Flick, Uwe (2002). *An Introduction to Qualitative Research*. Second edition. London, Sage Publications.
- Fullan, Michael G. (1991), *The New Meaning of Educational Change*, England, Cassell Educational Limited.
- Guba, Egon G. dan Lincoln, Yvonna S. (1981) *Effective Evaluation: Improving the Usefulness of Evaluation Results Through Responsive and Naturalistic Approach*, San Francisco, Jossey-Bass Inc.
- _____ (1985), *Naturalistic Inquiry*, California, Sage Publications, Inc.
- Harrington, H. J. (1987). *The Improvement Process; How America's Leading Company Improve Quality*, New York : McGraw-Hill Book Company.
- Hasbullah (2001), *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan perkembangan* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Kuhn, Thomas S. (1970) *The Structure of Scientific Revolution*. Second Edition. London, The University of Chicago Press. Ltd.
- Maksum (1999), *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta, Logos.
- Mastuhu (1999), *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos.
- Mastuhu (1994), *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta, INIS.
- Moleong, Lexy. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhadjir, Noeng. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Andi Ofset.
- Muhaimin, et.al. (2002), *Paradigma Pendidikan Islam: upaya mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, A. dan Aly, Abdullah (1999), *Sejarah Pendidikan Islam: untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, Bandung, PT Pustaka Setia.
- Nasution, S. (1990). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abudin (2005), *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Ross, Tweed Wall dan Bailey, Gerald D. (1994) *Reform, Restructuring, and Transformation - Terms in Search of Definition Which will Determine Our Fate as a Nation in the 21st Century*, <http://Proquest.Umi.com/>. Download: Desember 2005.

- Seidman, Edward (1983), *Handbook of Social Intervention*, Beverly Hill/London/ New Delhi, Sage Publication.
- Sirozi, Muhammad (2004), *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU. No. 2/1989.*, Leiden –Jakarta, INIS.
- Squires, David A. *et. Al.* (1983). *Effective School and Classroom : a Research-Based Perspective*, Alexandria : Association for Supervision and Curriculum Development.
- Steenbrink, Karel A. (1994), *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moden*, Jakarta, LP3ES.
- Suwito dan Fauzan, edt. (2004), *Perkembangan Pendidikan Islam di Nusantara: Studi Perkembangan Sejarah dari Abad 20 M.*, Bandung, Angkasa.
- Tafsir, Ahmad (2002), *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung, PT Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 1989. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Zuhairini, *et.al.* (2004), *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara Bekerjasama dengan Dirjen Bagais, Departeme Agama RI.
- Jalal, Abd al-Fatah (1977), *Min Usul al-Tarbiyah fi al-Islam*, Kairo, Darul al-Kutub al-Misriyah.